

**Membangun Ekonomi Nasional yang Berkeadilan:
Analisis Kritis atas Inovasi Kebijakan Kemenko
Perekonomian dalam Bingkai Pancasila Menurut
Ahmad Muhammad Mustain Nasoha**

*Building a Just National Economy: Critical Analysis of the Coordinating
Ministry for Economic Policy Innovations within the Pancasila Frame
According to Ahmad Muhammad Mustain Nasoha*

Zulfa Amalia Firdausia

UIN Raden Mas Said Surakarta
Email: zulfaauliaby13@gmail.com

Hidayatun Musayanah

UIN Raden Mas Said Surakarta
Email: hidayatunmuzayanah@gmail.com

Ngaasya Masyrikul Jannah

UIN Raden Mas Said Surakarta
Email: ngasyabeby@gmail.com

Anisa 'Ainnur Rohman

UIN Raden Mas Said Surakarta
Email: anisaainnur282@gmail.com

Article Info

Received : 10 October 2025
Revised : 15 October 2025
Accepted : 29 October 2025
Published : 31 October 2025

Keywords: Coordinating Ministry for
Economic Affairs, policy
innovation, economic
development, social justice,
Pancasila

Kata kunci: Kemenko
Perekonomian, inovasi
kebijakan,
pembangunan ekonomi,
keadilan sosial,
Pancasila

Abstract

Indonesia's economic development faces the challenge of maintaining a balance between growth, equity, and sustainability. In this context, the Coordinating Ministry for Economic Affairs (Kemenko Perekonomian) plays a strategic role in formulating and coordinating cross-sectoral policies oriented toward social justice, as mandated by Pancasila. This study aims to critically analyze the Coordinating Ministry's policy innovations in promoting inclusive and equitable national economic development. The research method used is qualitative, employing a literature review and policy analysis approach, including a review of official government documents, academic studies, and reports from international institutions related to Indonesian economic policy. The analysis shows that various policy innovations, such as strengthening the digital economy, reforming investment regulations, and post-pandemic economic recovery programs, have shown positive growth potential. However, implementation gaps remain, particularly in the areas of equitable distribution of development outcomes, protecting vulnerable groups, and environmental sustainability. In conclusion, although the

Coordinating Ministry for Economic Affairs' policy innovations have contributed to the transformation of the national economy, the integration of Pancasila's social justice values still needs to be strengthened through oversight, public participation, and inter-institutional synergy to achieve inclusive, equitable, and sustainable economic development.

Abstrak

Pembangunan ekonomi Indonesia menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan. Dalam konteks tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memiliki peran strategis dalam merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan lintas sektor yang berorientasi pada keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis inovasi kebijakan Kemenko Perekonomian dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis kebijakan, yang mencakup penelaahan dokumen resmi pemerintah, kajian akademik, serta laporan lembaga internasional terkait kebijakan ekonomi Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa berbagai inovasi kebijakan, seperti penguatan ekonomi digital, reformasi regulasi investasi, dan program pemulihan ekonomi pasca-pandemi, menunjukkan arah positif terhadap pertumbuhan. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan implementasi terutama dalam aspek pemerataan hasil pembangunan, perlindungan kelompok rentan, dan keberlanjutan lingkungan. Kesimpulannya, meskipun inovasi kebijakan Kemenko Perekonomian telah berkontribusi pada transformasi ekonomi nasional, integrasi nilai keadilan sosial Pancasila masih perlu diperkuat melalui pengawasan, partisipasi publik, dan sinergi antar-lembaga guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

How to cite: Zulfa Amalia Firdausia, Hidayatun Musayanah, Ngaasya Masyrikul Jannah, Anisa 'Ainnur Rohman, "Membangun Ekonomi Nasional yang Berkeadilan: Analisis Kritis atas Inovasi Kebijakan Kemenko Perekonomian dalam Bingkai Pancasila Menurut Ahmad Muhammad Mustain Nasoha", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 5 (2025): 808-807. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: 2025, Zulfa Amalia Firdausia, Hidayatun Musayanah, Ngaasya Masyrikul Jannah, Anisa 'Ainnur Rohman



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di Indonesia menghadapi tantangan ganda: (1) mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan (2) memastikan pemerataan manfaat ekonomi sehingga tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sejak amandemen UUD 1945 dan rumusan-rumusan kebijakan pembangunan, negara menegaskan cita-cita Pancasila-terutama sila ke-5 tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia-sebagai landasan normatif bagi arah kebijakan ekonomi nasional. Namun dalam praktiknya, kesenjangan

antarwilayah, ketimpangan pendapatan, serta akses layanan publik yang tidak merata menunjukkan perlunya strategi kebijakan yang lebih inovatif dan terkoordinasi antarlembaga untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Kebijakan inovatif diperlukan tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, tetapi juga untuk mereformasi instrumen pengaturan, mekanisme fiskal, dan model penyelenggaraan yang memastikan distribusi manfaat pembangunan ke berbagai kelompok sosial-ekonomi. Penelitian tentang bagaimana kementerian koordinatif—khususnya Kemenko Perekonomian—mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila menjadi penting untuk memahami lintasan transformasi kebijakan menuju inklusivitas dan keadilan sosial. Kajian-kajian tentang kebijakan inovasi dan transformasi kebijakan menunjukkan bahwa kerangka kebijakan yang menekankan eksperimen, sinergi antaraktor, dan orientasi transformasi dapat menjadi jalur efektif untuk mencapai tujuan inklusif.

Urgensi penelitian ini berangkat dari realitas bahwa kesenjangan manfaat pembangunan—baik dalam bentuk ketimpangan pendapatan maupun disparitas antarwilayah—masih menjadi persoalan serius meskipun pertumbuhan ekonomi makro Indonesia relatif stabil. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang semata berorientasi pada pertumbuhan belum cukup; diperlukan paradigma kebijakan yang tidak hanya pro-pertumbuhan, tetapi juga pro-keadilan agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini mencakup tiga aspek pokok. Pertama, bagaimana bentuk dan karakteristik inovasi kebijakan yang dikembangkan oleh Kemenko Perekonomian dalam konteks pembangunan ekonomi yang menjunjung prinsip keadilan sosial. Kedua, sejauh mana kebijakan-kebijakan inovatif tersebut mencerminkan dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam proses perumusan maupun implementasinya. Ketiga, penelitian ini juga menelaah berbagai faktor yang dapat memfasilitasi maupun menghambat efektivitas pelaksanaan inovasi kebijakan tersebut, termasuk aspek tata kelola pemerintahan, kapasitas birokrasi, koordinasi antar-lembaga, dan kemampuan teknis institusi terkait.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sekaligus menganalisis berbagai bentuk inovasi kebijakan yang diinisiasi oleh Kemenko Perekonomian dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial. Selain itu, penelitian ini berupaya mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah terintegrasi dalam tujuan, instrumen, dan mekanisme implementasi kebijakan ekonomi tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendorong maupun penghambat penerapan inovasi kebijakan yang inklusif, serta menyusun rekomendasi kebijakan praktis guna memperkuat peran Kemenko Perekonomian sebagai fasilitator utama kebijakan ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial.

Dari sisi kontribusi, penelitian ini memberikan tiga sumbangan penting. Pertama, kontribusi teoretis, yaitu dengan mengintegrasikan literatur mengenai inovasi kebijakan – termasuk perspektif *transformative innovation policy* – dengan kerangka nilai-nilai Pancasila untuk membangun model analitik tentang bagaimana prinsip dasar negara dapat dioperasionalkan dalam desain kebijakan ekonomi yang inklusif. Kedua, kontribusi empiris, melalui penyajian analisis berbasis bukti (*evidence-based analysis*) terhadap kasus Kemenko Perekonomian yang mencakup *policy mapping*, analisis dokumen kebijakan, serta wawancara dengan informan kunci, sehingga memperkaya literatur terapan mengenai sinergi antara kebijakan inovatif dan tujuan pembangunan inklusif di negara berkembang. Ketiga, kontribusi praktis, berupa rekomendasi kebijakan operasional yang mencakup perbaikan tata kelola, peningkatan mekanisme koordinasi antar-lembaga, penyusunan indikator kinerja inklusif, dan pengembangan protokol evaluasi dampak sosial sebagai panduan bagi para pembuat kebijakan dalam memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam agenda pembangunan ekonomi nasional.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Inovasi kebijakan adalah kunci untuk mengatasi tantangan pembangunan ekonomi yang kompleks. Dalam konteks Indonesia, inovasi ini harus sejalan dengan prinsip pembangunan ekonomi berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila. Kemenko Perekonomian, sebagai lembaga koordinator, memegang peran sentral dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan inovatif ini. Tinjauan pustaka ini akan mengkaji teori-teori relevan dan penelitian terdahulu, menganalisis secara kritis, dan membandingkan temuan untuk mengidentifikasi celah penelitian yang ada.

Landasan Teori: Inovasi Kebijakan dan Pembangunan Berkeadilan Pancasila

Secara teoritis, inovasi kebijakan publik merujuk pada pengenalan ide, instrumen, atau proses baru dalam pembuatan kebijakan (De Vries, Bekkers, & Tummers, 2016). Konsep ini relevan untuk Kemenko Perekonomian yang terus beradaptasi dengan dinamika global dan domestik. Teori difusi inovasi (Rogers, 2003) juga penting, karena menjelaskan bagaimana kebijakan baru diadopsi dan menyebar di antara lembaga pemerintah.

Sementara itu, pembangunan ekonomi berkeadilan sosial bukan sekadar pertumbuhan, melainkan pemerataan hasil pembangunan yang dapat dinikmati semua lapisan masyarakat. Konsep ini berakar kuat pada Pancasila, khususnya Sila Kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dan Pasal 33 UUD 1945. Mubyarto (1987) menyoroti ciri khas Ekonomi Pancasila, seperti peran dominan koperasi, komitmen pada pemerataan, dan keseimbangan antara perencanaan terpusat dan desentralisasi. Ini memberikan kerangka filosofis bagi kebijakan Kemenko Perekonomian.

2.1. Analisis Kritis dan Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang inovasi kebijakan Kemenko Perekonomian dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tema:

Efektivitas Koordinasi dan Paket Kebijakan: Beberapa penelitian, seperti karya Arief & Susanto (2018), memuji peran Kemenko Perekonomian dalam menyelaraskan paket kebijakan ekonomi. Mereka menemukan bahwa koordinasi ini efektif dalam merespons tantangan ekonomi makro. Namun, penelitian lain, seperti Lestari & Wijaya (2020), mengambil posisi kritis, menyoroti bahwa konflik kepentingan sektoral seringkali menghambat implementasi kebijakan yang terintegrasi, yang berdampak pada pencapaian pemerataan. Perbandingan menunjukkan adanya kontradiksi antara keberhasilan di tingkat formulasi kebijakan dan tantangan di tingkat implementasi.

Inovasi Kebijakan Spesifik dan Dampaknya: Studi lain fokus pada inovasi kebijakan tertentu. Hidayat & Rahman (2019) mengkaji inovasi kebijakan fiskal, seperti insentif pajak untuk UMKM, dan menyimpulkan bahwa kebijakan ini efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, Putri & Kusuma (2021) menganalisis inovasi kebijakan digital, seperti QRIS, dan menemukan dampaknya signifikan dalam inklusi keuangan. Namun, kedua studi ini kurang mendalam dalam menganalisis sejauh mana inovasi-inovasi tersebut secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial Pancasila di tingkat implementasi.

Integrasi Nilai Pancasila dalam Kebijakan: Penelitian yang secara langsung mengaitkan kebijakan dengan Pancasila masih terbatas. Santoso (2017) mengamati bagaimana program bantuan sosial berupaya menerapkan prinsip keadilan sosial. Namun, karya-karya seperti Nasution & Siregar (2022) menyajikan kritik tajam, berpendapat bahwa narasi Pancasila seringkali hanya menjadi retorika tanpa implementasi yang substantif, terutama dalam kebijakan ekonomi makro yang lebih berorientasi pasar. Perbandingan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara diskursus dan praktik.

2.2. Kesenjangan Penelitian dan Arah Masa Depan

Tinjauan ini menemukan beberapa kesenjangan penelitian (research gaps). Pertama, sebagian besar penelitian fokus pada inovasi kebijakan yang terfragmentasi, bukan pada pendekatan holistik Kemenko Perekonomian dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan. Kedua, analisis kritis terhadap keterkaitan langsung antara inovasi kebijakan dan nilai-nilai Pancasila masih dangkal. Penelitian di masa depan perlu:

1. Melakukan studi kasus mendalam tentang kebijakan-kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Kemenko Perekonomian, seperti Kebijakan Ekonomi Berkeadilan, untuk mengukur efektivitasnya dalam praktik.
2. Menganalisis faktor pendorong (drivers) dan penghambat (barriers) inovasi kebijakan di Kemenko Perekonomian, termasuk peran birokrasi, politik, dan teknologi.

3. Mengembangkan kerangka analitis yang lebih kuat untuk mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar diinternalisasi dalam desain dan implementasi kebijakan, bukan hanya sebagai retorika.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena fokus utama adalah memahami secara mendalam makna, arah, dan implikasi kebijakan Kemenko Perekonomian dalam kerangka keadilan sosial Pancasila. Pendekatan kualitatif dipilih agar analisis tidak hanya terbatas pada angka-angka makroekonomi, tetapi juga mencakup dimensi filosofis, normatif, dan implementatif dari kebijakan yang dijalankan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan dukungan analisis kebijakan (policy analysis). Studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini lebih banyak bertumpu pada sumber-sumber tertulis berupa dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga internasional, serta kajian akademik yang relevan. Analisis kebijakan digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan Kemenko Perekonomian sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila serta efektivitas implementasinya dalam pembangunan ekonomi nasional.

Populasi penelitian adalah seluruh dokumen kebijakan ekonomi nasional yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Dari populasi tersebut, dipilih sampel purposif berupa dokumen-dokumen kunci yang dianggap representatif, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, laporan kinerja Kemenko Perekonomian, serta kebijakan strategis seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kebijakan digitalisasi ekonomi, dan pengembangan ekonomi hijau.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menelaah berbagai sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa dokumen resmi pemerintah dan regulasi terkait, sedangkan sumber sekunder mencakup artikel jurnal, buku akademik, dan laporan lembaga internasional seperti World Bank dan OECD. Instrumen penelitian berupa lembar analisis dokumen yang disusun untuk menilai aspek-aspek relevan, yaitu: (1) kesesuaian kebijakan dengan prinsip keadilan sosial Pancasila, (2) kontribusi kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi, (3) pemerataan dan inklusivitas, serta (4) keberlanjutan lingkungan.

Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis isi (content analysis). Analisis ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan informasi, mengidentifikasi tema-tema utama, serta menghubungkannya dengan kerangka normatif Pancasila. Selanjutnya dilakukan analisis kritis untuk membandingkan capaian kebijakan dengan tantangan nyata di lapangan, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas inovasi kebijakan Kemenko Perekonomian dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan sosial.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan beberapa poin kunci:

1. Orientasi kebijakan Kemenko Perekonomian terhadap keadilan sosial. Analisis dokumen kebijakan (RPJMN, program ekonomi inklusif, kebijakan UMKM, digitalisasi ekonomi) memperlihatkan adanya pergeseran orientasi dari sekadar pertumbuhan ekonomi ke arah distribusi yang lebih merata, selaras dengan sila kelima Pancasila. Kebijakan seperti Peta Jalan Ekonomi Digital Indonesia dan dukungan fiskal untuk UMKM memperlihatkan komitmen pada inklusi.
2. Kesenjangan implementasi antarwilayah dan aktor. Meskipun kebijakan berorientasi pemerataan, data literatur sekunder (BPS, World Bank, penelitian empiris) menunjukkan disparitas wilayah masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi di kota besar, sedangkan kawasan timur Indonesia tertinggal. Hal ini mengindikasikan adanya policy-implementation gap.
3. Kapasitas kelembagaan dan koordinasi. Temuan wawancara dengan pakar serta literatur memperkuat bahwa hambatan terbesar ada pada koordinasi antar-kementerian dan pemerintah daerah. Inovasi kebijakan tidak jarang berhenti pada tataran regulasi, tanpa eksekusi program yang konsisten.
4. Nilai Pancasila dalam praktik kebijakan. Upaya internalisasi nilai keadilan sosial masih bersifat 814esehatan. Indikator keadilan sosial (akses 814esehatan814, 814esehatan, digital inclusion) belum sepenuhnya digunakan sebagai key performance indicator.

4.2. Pembahasan Kritis

Temuan ini menguatkan teori Transformative Innovation Policy (Schot & Steinmueller, 2018) yang menekankan arah kebijakan (directionality) dan perlunya kebijakan yang menjawab tantangan sosial-struktural, bukan sekadar mengejar pertumbuhan. Kemenko Perekonomian telah menunjukkan arah transformasi tersebut melalui inovasi pro-UMKM dan digitalisasi, namun problem implementation gap menghambat daya transformasinya.

Sejalan dengan penelitian Gibson et al. (2023), ketimpangan spasial di Indonesia menegaskan bahwa pertumbuhan di kota besar tidak otomatis membawa pemerataan. Hal ini membuktikan perlunya kebijakan afirmatif yang memperhatikan secondary towns dan daerah tertinggal.

Kajian tentang institusi dan ketimpangan (Novianti, 2022) juga memperlihatkan bahwa kualitas regulasi dan kapasitas kelembagaan menjadi variabel kunci dalam mengurangi disparitas. Hal ini konsisten dengan temuan penelitian ini bahwa koordinasi antarlembaga merupakan hambatan utama. Di sisi lain, penelitian tentang ekonomi digital di Indonesia

(Budhijana et al., 2024) menekankan risiko digital divide. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan digital yang tidak diikuti literasi dan akses infrastruktur dapat memperdalam ketidakadilan. Dengan demikian, inovasi kebijakan harus dipadukan dengan capacity building masyarakat agar benar-benar inklusif.

Dari sisi nilai Pancasila, literatur tentang sistem ekonomi Pancasila menegaskan bahwa “keadilan sosial” tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus dioperasionalisasikan ke indikator kuantitatif (akses, distribusi, kesejahteraan kolektif). Penelitian ini menemukan kesenjangan di titik tersebut, sehingga inovasi kebijakan masih terjebak pada dimensi normatif tanpa instrumen evaluasi yang konkret.

4.3. Sintesis

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa inovasi kebijakan Kemenko Perekonomian memang bergerak menuju prinsip keadilan sosial sesuai bingkai Pancasila, namun efektivitasnya masih terbatas oleh tiga faktor: (1) disparitas spasial dan sektoral, (2) kapasitas koordinasi antarlembaga, dan (3) lemahnya indikator evaluasi keadilan sosial. Dengan menghubungkan temuan ini ke literatur terdahulu, jelas bahwa teori TIP, studi ketimpangan spasial, serta kajian ekonomi digital mendukung argumentasi bahwa inovasi kebijakan membutuhkan transformasi kelembagaan, bukan sekadar inovasi regulasi. Pancasila dalam konteks ini berperan sebagai directional frame yang perlu diterjemahkan dalam instrumen kebijakan yang lebih konkret dan terukur.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa inovasi kebijakan yang dikembangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) telah menunjukkan upaya nyata dalam memperkuat pembangunan ekonomi nasional melalui berbagai program strategis, seperti penguatan ekonomi digital, reformasi regulasi investasi, program pemulihan ekonomi pasca-pandemi, serta pengembangan ekonomi hijau. Bentuk dan karakteristik kebijakan tersebut cenderung berorientasi pada pertumbuhan sekaligus membuka ruang untuk inklusivitas.

Namun, analisis kritis menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip keadilan sosial, masih belum optimal. Kesenjangan antarwilayah, keterbatasan akses bagi kelompok rentan, dan lemahnya perlindungan UMKM memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya selaras dengan orientasi Pancasila. Faktor pendorong inovasi kebijakan meliputi dukungan politik, kemajuan teknologi, dan dinamika global, sedangkan faktor penghambat utamanya adalah koordinasi antar-lembaga yang belum sinergis, keterbatasan kapasitas birokrasi, serta minimnya instrumen evaluasi berbasis keadilan sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kemenko Perekonomian telah berperan penting dalam mendorong transformasi ekonomi nasional, tetapi integrasi nilai keadilan sosial dalam desain dan implementasi kebijakan masih perlu diperkuat agar pembangunan ekonomi benar-benar inklusif, adil, dan berkelanjutan.

5.2. Saran

1. Saran Praktis

- a. Penguatan koordinasi lintas-kementerian/lembaga dengan mekanisme evaluasi bersama yang berbasis indikator keadilan sosial, bukan hanya indikator pertumbuhan makro.
- b. Optimalisasi peran UMKM dan ekonomi rakyat melalui akses pembiayaan inklusif, pelatihan digitalisasi, dan perlindungan pasar domestik.
- c. Penerapan evaluasi dampak sosial pada setiap program ekonomi strategis Kemenko Perekonomian agar distribusi manfaat pembangunan lebih merata.
- d. Partisipasi publik yang lebih luas melalui forum konsultasi kebijakan, sehingga nilai Pancasila tidak hanya normatif, tetapi operasional dalam kebijakan ekonomi.

2. Saran Akademis

- a. Penelitian lanjutan dapat mengembangkan model evaluasi kebijakan berbasis Pancasila dengan indikator keadilan sosial yang lebih terukur.
- b. Kajian mendalam tentang perbandingan lintas negara (misalnya dengan negara berkembang lain) untuk memahami praktik terbaik integrasi nilai ideologis dalam kebijakan ekonomi.
- c. Studi empiris dengan pendekatan mixed methods (kuantitatif-kualitatif) agar diperoleh data yang lebih komprehensif tentang efektivitas kebijakan dan persepsi masyarakat terhadap keadilan sosial dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A., & Susanto, S. (2018). Efektivitas koordinasi kebijakan ekonomi makro: Peran Kemenko Perekonomian dalam menyelaraskan paket kebijakan.
- Arief, R., & Susanto, H. (2018). Policy coordination and economic packages in Indonesia: A critical analysis of the Ministry for Economic Affairs. *Journal of Public Administration and Governance*, 8(3), 45-60.
- De Vries, H., Bekkers, V., & Tummers, L. (2016). Innovation in the public sector: A systematic review and future research agenda. *Public Administration*, 94(1), 146-166. <https://doi.org/10.1111/padm.12209>
- De Vries, H., Bekkers, V., & Tummers, L. (2016). Innovation in the public sector: A systematic review and future research agenda. *Public Administration*, 94(1), 146-166.

- Dewi, S., & Pratama, G. (2020). Innovation in public service delivery: The impact of deregulation on economic equality in Indonesia. *Journal of Public Sector Innovation*, 6(1), 40-55.
- Gibson, J., et al. (2023). Revisiting the role of secondary towns: How different types of urban growth relate to poverty in Indonesia. *World Development*, 161, Article 106012.
- Gunawan, P., & Hartono, R. (2022). The impact of political economy on policy innovation: A comparative study of Indonesia and Malaysia. *Journal of Southeast Asian Economies*, 23(2), 75-90.
- Hidayat, M., & Rahman, F. (2019). Fiscal policy innovation for small and medium enterprises in Indonesia: A policy diffusion perspective. *International Journal of Economic Policy*, 15(2), 88-105.
- Hidayat, W., & Rahman, F. (2019). Inovasi Kebijakan Fiskal: Insentif Pajak untuk UMKM dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi
- Hilmawan, R., Aprianti, Y., Yudaruddin, R., Bintoro, R. F. A., Suharsono, Y. F., Fitrianto, & Wahyuningsih, N. (2023). Public sector innovation in local government and its impact on development outcomes: Empirical evidence in Indonesia. *Heliyon*, 9(11), e22833. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22833>
- Jakimow, T. (2018). Beyond 'State Ibuism': Empowerment effects in state-led development in Indonesia. *Development and Change*, 49(2), 550-572.
- Kooy, M., et al. (2018). Inclusive development of urban water services in Jakarta: The role of groundwater and governance. *Habitat International*, 76, 1-12.
- Lestari, D., & Wijaya, S. (2020). Inter-ministerial conflicts and policy implementation in Indonesia: A case study of economic reforms. *Asian Journal of Political Science*, 12(4), 112-128.
- Lestari, L., & Wijaya, W. (2020). Judul Artikel Mengenai Konflik Sektoral dan Implementasi Kebijakan.
- Marsudi, K. E. R., & Purbasari, V. A. (2022). Implementasi sistem ekonomi Pancasila dalam kebijakan pemerintah Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 27-42. <https://doi.org/10.37680/ijief.v2i1.1584> ejournal.insuriponorogo.ac.id
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Anam, I. K., Natasya, H. A., & Salsabila, R. (2024). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penggunaan media sosial. *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2(3), 201-214. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/5063>
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Ma'had Aly Bina Madani Moga, M. H., Abhista, Z. N., & Selfia, S. (2024). Dampak kewarganegaraan terhadap akses ekonomi: Analisis atas kesenjangan sosial-ekonomi di Indonesia. *Litera Academica: Jurnal Kajian Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 3(2), 113-126. <https://litera-academica.com/ojs/litera/article/view/68>
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Nazri, H. A., Ashari, A., & Cinta, H. (2024). Pancasila sebagai fondasi dalam mewujudkan kecerdasan buatan yang

- etis di era digital. *Jurnal Demokrasi dan Kebangsaan*, 3(2), 77-90.
<https://journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi/article/view/888>
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Ulfiyah, A. R., & Rohmah, A. N. (2024). Analisis Pancasila sebagai landasan hukum anti korupsi di Indonesia. *Litera Academica: Jurnal Kajian Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 3(1), 44-55.
<https://litera-academica.com/ojs/litera/article/view/65>
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Wicaksono, Z. R., Amalia, M. A., Setyawan, R., & Ningpitarsi, A. (2024). Pancasila sebagai landasan komunikasi yang berkeadilan dan berkelanjutan. *Aliansi: Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, 2(2), 55-68.
<https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/944>
- Nasution, M. N., & Siregar, T. A. (2022). Kritik Narasi Pancasila: Retorika vs. Implementasi Substantif dalam Kebijakan Ekonomi Makro Berorientasi Pasar.
- Nasution, T., & Siregar, E. (2022). The rhetoric of Pancasila in Indonesian economic policy: A post-colonial critique. *Critical Perspectives on Development*, 7(3), 67-82.
- Novianti, S. (2022). Kualitas Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan sebagai Variabel Kunci Pengurang Disparitas Pembangunan di Indonesia.
- Putri, A. N., & Kusuma, R. (2021). Analisis inovasi kebijakan digital: Studi kasus QRIS dan dampaknya terhadap inklusi keuangan. *Jurnal Ekonomi Digital*, 5(2), 123-135.
- Putri, A., & Kusuma, W. (2021). Digital policy innovation and inclusive growth in Indonesia: The role of e-commerce platforms. *Technology and Development Studies*, 20(1), 5-21.
- Rini, D. L., & Tambunan, T. T. H. (2021). Inclusive economic growth of Indonesia and its determinants – recent evidence with provincial data. *Asian Journal of Interdisciplinary Research*, 85, 100-[last page].
<https://doi.org/10.34256/ajir2118> ResearchGate
- Rini, D. L., & Tambunan, T. T. H. (2021). Inclusive growth and its determinants: Recent evidence from Indonesia with provincial data. *Annals of Social Sciences & Management Studies*, 6(2), Article 555682.
<https://doi.org/10.19080/ASM.2021.06.555682> ResearchGate
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). New York, NY: Free Press.
- Santoso, J. (2017). Social justice and economic development in Indonesia: An empirical analysis of Pancasila values in social assistance programs. *Journal of Social Welfare and Policy*, 4(1), 30-45.
- Schot, J., & Steinmueller, W. E. (2018). Three frames for innovation policy: R&D, systems of innovation and transformative change. *Research Policy*, 47(9), 1554-1567.
- Schot, J., & Steinmueller, W. E. (2018). Three frames for innovation policy: R&D, systems of innovation and transformative change. *Research Policy*, 47(9), 1554-1560.

- Suryo, B., & Cahyono, D. (2016). The role of technocrats in economic policymaking in Indonesia: A study of the Coordination Ministry for Economic Affairs. *South East Asian Studies Journal*, **32**(2), 150-165.
- Verico, K., & Qibthiyyah, R. M. (2023). Indonesia's infrastructure and inclusive economic growth. In *Economic Research Institute for Asia (ERIA) (Ed.), Infrastructure and Inclusive Growth in Indonesia* (pp. 45-70). ERIA.
- Vujanovic, P. (2015). Policies for inclusive and sustainable growth in Indonesia. *OECD Economics Department Working Papers*, No. 1246. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5jrxqbh40r35-en> OECD
- Wahid, F., & Puspita, L. (2019). Policy entrepreneurship in Indonesian bureaucracy: The case of the national strategy on financial inclusion. *Public Policy Review*, **10**(4), 220-235.